

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Evi Fitriani (evi91@yahoo.com)

Rika Lidyah, Icha Fajriyana

Jurusan Akuntansi S1

STIE MDP

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desain penelitian asosiatif kausal, dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data periode tahun 2010-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument penelitian, pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract : *This study aims to determine how the effect of the tax collection forced letter on tax compliance. This research was conducted at the Tax Office Primary West Ilir Palembang. The research method used is to use associative causal research design, with a sample of 100 taxpayers. This study was conducted using data period 2010-2012. The type of data used is secondary data. Data obtained through the Tax Office Primary West Ilir Palembang. The data collected were analyzed by the method of data analysis test is conducted prior research instrument, the classical assumption test before testing the hypothesis.*

Key Words : *Tax Billing, Forced Letters, Taxpayer Compliance.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ketahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyeter dan melaporkan besarnya pajak

yang terutang pada Kantor Pelayanan Pajak. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar *Self Assessment system* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perkembangan jumlah pembayaran pajak dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Menurut Resmi (2009,h.1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (2006,h.1),yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Soemahamidjaja (2004,h.5), yaitu “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan undang-undang no.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

2.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban pajak diantaranya adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
3. Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan wajib pajak, atau objek terhutang pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu atau memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - 3) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu tiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.5 Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

1. Surat Teguran Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.
2. Surat Paksa Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran
3. Surat Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila hutang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.
4. Lelang Apabila Wajib Pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak para wajib pajak yang enggan membayar pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

3 Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Ada tiga pendekatan penelitian yaitu:

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih Sugiyono (2003,h.11). penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini digolongkan kedalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen Sugiyono (2003,h.37). peneliti menggunakan penelitian asosiatif karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penagihan pajak dengan surat paksa sedangkan subjek yaitu Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Pemilihan Informan Kunci

Informan kunci yang didapat dalam penelitian ini didapat dari seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- a) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber pertama (asli) tidak melalui perantara.

- b) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer digunakan sebagai alat pelengkap penjelasan mengenai keadaan objek penelitian, melalui kuesioner yang diberikan dan diisi langsung oleh responden yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian Pustaka

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

- b) Penelitian kuesioner

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Dengan menggunakan kuesioner, berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.

3.6 Analisis Data dan Teknik Analisis Data

- a. Analisis Data.

Penelitian menggunakan data kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen

untuk mengumpulkan data, menurut Sugiyono (2003, h.105), instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.

- b. Teknik Analisa Data

Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiono (2006, h.86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

- 1. Statistik Deskriptif

Menurut wijaya (2012, h.43-44) statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan data penelitian.

- 2. Pengujian Instrument

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliable

- 3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006, h.110), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal

- b. Uji Heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

- 4. Pengujian Hipotesis

- a. Uji t

Uji-t dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan dan menganalisis data dengan

menggunakan analisis uji-t yang diolah dengan bantuan program SPSS

b. Uji Determinasi

digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Surat paksa

Tabel 4.1
Jumlah Surat Paksa

Tahun	Jumlah surat paksa	Nilai surat paksa
2010	3074	8,028,218,771
2011	3232	14,651,308,995
2012	4578	8,129,290,893

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2013

Jumlah surat paksa yang dikeluarkan pada tahun 2010 mencapai 3074 lembar, dengan nilai sebesar 8,028,218,77. Pada tahun 2011 surat paksa yang dikeluarkan mengalami peningkatan yaitu mencapai 158 sehingga menjadi 3232 lembar dengan nilai sebesar 14,651,308,995. Sedangkan tahun 2012 surat paksa yang dikeluarkan mengalami peningkatan mencapai 1346 sehingga menjadi 4578 lembar dengan nilai 8,129,290,893.

2. Statistik deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Responden

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
total penagihan pajak dengan surat paksa	100	19	34	28.17	3.062
total kepatuhan wajib pajak	100	7	15	11.94	1.536
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Yang Diolah Melalui SPSS 17 Oleh Penulis 2013

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebanyak 100 responden mempunyai hasil minimum 19, maksimum 34, rata-rata 28.17, dan standar deviation 3.062. Sedangkan total kepatuhan wajib pajak variabel (Y) sebanyak 100 responden mempunyai hasil minimum 7, maximum 15, rata-rata 11,94, dan standar deviation 1,536.

3. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel x

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item X1	0,500	0,195	Valid
Item X2	0,572	0,195	Valid
Item X3	0,471	0,195	Valid
Item X4	0,495	0,195	Valid
Item X5	0,463	0,195	Valid
Item X6	0,567	0,195	Valid
Item X7	0,509	0,195	Valid
Item X8	0,543	0,195	Valid

Sumber : Data yang Diolah melalui SPSS 17 oleh penulis

Dari hasil perhitungan tabel 4.3 seluruh nilai korelasi setiap pertanyaan variabel (X) lebih besar dari nilai *r product moment pearson tabel* sebesar 0,195 berarti seluruh pertanyaan variabel (X) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item Y1	0,666	0,195	Valid
Item Y2	0,799	0,195	Valid
Item Y3	0,799	0,195	Valid

Sumber : Data yang Diolah melalui SPSS 17 oleh penulis

Dari hasil perhitungan tabel 4.4 seluruh nilai korelasi setiap pertanyaan variabel (Y) lebih besar dari nilai *r product moment pearson tabel* sebesar 0,195 berarti seluruh pertanyaan variabel (Y) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Realibilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Reabilitas Variabel x

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	8

Sumber : Data yang Diolah melalui SPSS 17 oleh penulis

Dari tabel 4.5 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel (X) lebih besar dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 berarti dari variabel (X) dinyatakan reliabel. Artinya penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	8

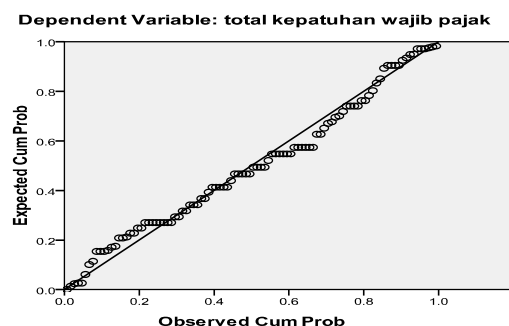
Sumber : Data yang Diolah melalui SPSS 17 oleh penulis

Dari tabel 4.6 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel (Y) lebih besar dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 berarti dari variabel (Y) dinyatakan reliabel. Artinya penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data yang diolah melalui SPSS 17 oleh penulis 2013

Gambar 4.1
Hasil Uji Naormalitas

Dari gambar diatas terlihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa penagiihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	116	988		118	.907
skor jawaban x1	-.015	.195	-.009	-.079	.937
skor jawaban x2	.228	.170	.171	1.341	.183
skor jawaban x3	.015	.160	.011	.097	.923
skor jawaban x4	.089	.150	.068	.591	.556
skor jawaban x5	-.087	.142	-.067	-.613	.542
skor jawaban x6	-.090	.152	-.070	-.593	.551
skor jawaban x7	.003	.163	.003	.021	.983
skor jawaban x8	.174	.142	.149	1.226	.223

a. Dependent Variable: RES2

sumber : data yang diolah melalui SPSS 17 oleh penulis 2013

output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Delapan variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.056	1.406		6.442	.000
Total Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	.102	.050	.204	2.063	.042

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan Waib Pajak

Sumber : data yang diolah melalui SPSS 17 oleh penulis 2013

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa t hitung untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan 2,063, berarti t hitung > t tabel (2,063>1,984467), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan memiliki tingkat signifikan 0,042 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini H0 ditolak dan H1 diterima, artinya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.204 ^a	.042	.032	1.512

a. Predictors: (Constant), total X

sumber : data yang diolah melalui SPSS 17 oleh penulis 2013

dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi (KD) sebesar 4,2 % yang dapat ditafsirkan bahwa variabel

bebas penagihan pajak dengan surat paksa (x) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 4,2% terhadap kepatuhan wajib pajak (y) dan 95,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam variabel penagihan pajak dengan surat paksa.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dilakukan oleh suatu bagian tersendiri. Pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak terdapat sebuah seksi yaitu Seksi Penagihan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai seksi bertugas sebagai pengawas dari semua kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Seksi Waskon akan memberikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik. Apabila Wajib Pajak sudah dilakukan pendekatan dan himbauan secara persuasif tidak merespon dengan baik maka Seksi Waskon dapat meminta Seksi Pemeriksaan untuk melakukan tindakan pemeriksaan tersebut maka akan menghasilkan suatu produk ketetapan yang akan diterbitkan oleh Seksi Pelayanan.

Produk ketetapan yang dihasilkan tersebut dapat berupa SKPN, SKPLB, SKPKB, SKPKBT. Dalam hal ini SKPLB maka seksi waskon harus segera menerbitkan SPMKP untuk mengembalikan uang Wajib Pajak, sedangkan untuk SKPKB dan SKPKBT apabila telah jatuh tempo Wajib Pajak tidak membayar maka disinilah peranan Seksi Penagihan untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penatausahaan piutang pajak dari piutang pajak yang masih dalam proses penagihan sampai pada utang yang sudah kadaluwarsa. Dalam hal utang pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran maka tugas seksi penagihan adalah melakukan serangkaian penagihan.

Dari tahun ke tahun penunggakan pajak terus meningkat, setiap tahunnya selalu besar. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang

tercemin dari *tax gap* dan *tax ratio*. Hanya untuk data yang akurat mengenai *tax gap* Indonesia belum tersedia.

Dari tahun ke tahun jumlah surat paksa yang dikeluarkan untuk menagih utang pajak terus meningkat. Ini tentunya bukan prestasi tetapi menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin tidak patuh karena semakin banyak surat paksa yang harus dikeluarkan menunjukan semakin banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai mestinya. Kenaikan jumlah surat paksa antara tahun 2010 dengan tahun 2011 sebesar 158 lembar sedangkan di tahun 2011 dengan tahun 2012 sebesar 1346 lembar.

Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak diakantor pelayanan pajak pada tahun 2010-2012 menunjukan bahwa nilai t hitung untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukan 2,063, berarti t hitung $>$ t tabel ($2,063 > 1,984467$), memiliki tingkat signifikansi 0,042 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

hasil diatas menunjukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Karena dalam membayar kewajiban perpajakannya sering tidak tepat waktu dari waktu yang telah ditetapkan. Sehingga dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa. Melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak. Undang-undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara .

5 Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya wajib pajak kurang patuh, ini terlihat terus meningkatnya surat paksa tiap tahun.
2. Dari hasil uji hipotesis (uji t) penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (H1 diterima). bahwa nilai t hitung untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan 2,063, berarti t hitung > t tabel ($2,063 > 1,984467$). Memiliki tingkat signifikansi 0,042 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

- a. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.
- c. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu

kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independen lainnya.

Daftar Pustaka

1. Resmi, Siti 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta, Salemba Empat
2. Sugiyono 2003, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan, Bandung, Alfabeta
3. Sarwono, Jonathan 2006, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, ANDI. Yogyakarta
4. Soemitro, Rochmat 2006, *Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*,
5. Waluyo, & Wirawan B. Ilyas 2009, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat